

Relasi Kurikulum dan Kekuasaan Politik: Analisis Kritis Kurikulum 1964 di Indonesia

The Relation Between Curriculum and Political Power: A Critical Analysis of the 1964 Curriculum in Indonesia

Mursyid Habib^{a,*}, Zulkarnain^{b,*}

^{ab} Universitas Negeri Yogyakarta

Jl. Colombo No.1, Karangmalang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55281

*Pos-el: mursyidhabib.2025@uny.ac.id, zulkarnain@uny.ac.id.

Abstrak. Kajian ini menganalisis relasi kritis antara desain kurikulum dan otoritas politik, dengan fokus pada instrumentalisasi Kurikulum 1964 pada era Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Secara historis, kajian mengenai kurikulum ini didominasi oleh narasi deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan yang dipadukan dengan analisis konten kritis, studi ini mengkaji bagaimana rezim mengintegrasikan ideologinya ke dalam sistem pendidikan. Melalui pembedingkaian analisis menggunakan lensa kritis Michael Apple, Louis Althusser, Paulo Freire, dan Henry Giroux, temuan penelitian menunjukkan bahwa kurikulum tersebut ditransformasikan dari sebuah kerangka pedagogis menjadi teknologi politik yang bertujuan untuk mengamankan hegemoni penguasa melalui ketetapan negara dan program indoktrinasi. Konsekuensinya, potensi holistik dari sistem Pancawardhana tereduksi menjadi aparatus ideologis. Pada akhirnya, kajian ini membuktikan bahwa kerentanan kurikulum bersumber dari ketergantungan strukturalnya pada kekuasaan politik yang bersifat sementara, alih-alih pada fondasi pedagogis yang otonom.

Kata Kunci: Kurikulum 1964, Demokrasi Terpimpin, Pancawardhana, Aparatus Ideologi, Resistensi Intelektual

Abstract. This study analyzes the critical relationship between curriculum design and political authority, focusing on the instrumentalization of the 1964 Curriculum during Indonesia's Guided Democracy era. Historically, studies on this curriculum have been dominated by descriptive narratives. Utilizing a library research approach combined with critical content analysis, this study examines how the regime integrated its ideology into the educational system. By framing the analysis through the critical lenses of Michael Apple, Louis Althusser, Paulo Freire, and Henry Giroux, the findings reveal that the curriculum was transformed from a pedagogical framework into a political technology aimed at securing sovereign hegemony through state decrees and indoktrination programs. Consequently, the holistic potential of the Pancawardhana system was reduced to ideological apparatus. Ultimately, this study demonstrates that curriculum vulnerability stems from its structural dependence on temporary political power rather than autonomous pedagogical foundations.

Keywords: 1964 Curriculum, Guided Democracy, Pancawardhana, Ideological Apparatus, Intellectual Resistance

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan jantung dari sistem pendidikan suatu bangsa. Sebagai dokumen hidup yang mencerminkan cita-cita, nilai, dan kepentingan zamannya, kurikulum tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu hadir sebagai produk dari konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya (Ananda & Hudaidah, 2021). Pernyataan ini paling nyata terlihat ketika kita menelaah Kurikulum 1964 Indonesia, sebuah kebijakan pendidikan yang lahir dari dan untuk kepentingan Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kurikulum ini bukan sekadar dokumen teknis pengajaran, melainkan manifestasi paling gamblang dari bagaimana sebuah rezim politik menggunakan pendidikan sebagai alat kekuasaan dan pembentukan subjek yang patuh kepada tatanan yang ada. Sebagaimana ditegaskan Zulkarnain (2017), pada masa Orde Lama filosofis dan praktik-praktik pendidikan sarat dengan muatan politis dan doktrin ideologis, karena para pengambil kebijakan kala itu lebih banyak disibukkan pada hal-hal yang berhubungan dengan konstitusi kenegaraan dari pada merumuskan filosofi pendidikan yang matang dan mandiri.

Dalam tradisi kajian kurikulum kritis, telah lama diakui bahwa kurikulum tidak pernah bersifat netral secara ideologis. Michael Apple (2004) menegaskan bahwa kurikulum adalah hasil dari *selective tradition*, yakni proses seleksi pengetahuan yang tidak pernah bebas dari kepentingan kelompok dominan, di mana pengetahuan yang dipilih maupun yang dipinggirkan selalu merupakan Keputusan yang sarat nilai dan kepentingan politik. Lebih jauh lagi, Louis Althusser (1971) memetakan sekolah sebagai salah satu *Ideological State Apparatus* (ISA) yang berfungsi mereproduksi ideologi dominan dan

mempersiapkan subjek yang patuh pada tatanan, berbeda dari aparat represif seperti militer dan polisi yang bekerja melalui kekerasan. Sementara itu, Paulo Freire (1970) mengkritik *banking education* (pendidikan bergaya bank) yang memperlakukan peserta didik sebagai wadah kosong untuk diisi pengetahuan otoritas, ketimbang sebagai subjek yang berfikir kritis. Melengkapi ketiganya, Henry Giroux (1983) melalui teori resistensinya menegaskan bahwa kurikulum tidak pernah bekerja tanpa perlawanan, semakin keras negara memaksakan ideologi melalui Pendidikan, semakin kuat pula resistensi yang muncul dari komunitas yang kritis. Keempat kerangka teoritis inilah yang menjadi lensa utama dalam artikel ini untuk membaca dan menganalisis fenomena Kurikulum 1964 di Indonesia.

Konteks historis lahirnya Kurikulum 1964 tidak dapat dipisahkan dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ketika Soekarno membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, menandai berakhirnya demokrasi parlementer dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan terkonsentrasi pada Presiden Soekarno, DPR hasil pemilu dibubarkan dan diganti dengan DPR Gotong Royong (DPR GR) yang sebagian besar anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden, serta Manipol USDEK ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara melalui TAP MPRS No. I/1960 (Arka & Agung, 2021; Hati et al., 2022). Kebijakan pendidikan pada masa ini secara eksplisit merujuk kepada isu nasionalisasi dan ideologisasi, filosofi pendidikan diwajibkan berdasarkan Pancasila dan Manipol USDEK yang materinya berorientasi pada sosialisme dalam perspektif Indonesia (Kurnia, 2021). Hasilnya adalah lahirnya Rentjana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964,

yang berpusat pada sistem Pancawardhana sebagai kerangka pengembangan potensi peserta didik. Di permukaan, Pancawardhana tampak sebagai kerangka pendidikan holistik yang progresif. Namun di balik visi holistiknya, kurikulum ini menyimpan kontradiksi yang dalam antara idealisme pedagogis dan kepentingan ideologis rezim.

Kajian akademik tentang Kurikulum 1964 selama ini didominasi oleh pendekatan historis deskriptif yang merekam latar belakang politik, struktur Pancawardhana, dan proses transisi menuju Kurikulum 1968 (Respatiadi et al., 2022; Sulmi & Bahri, 2025; Wibowo, 2021). Kajian-kajian ini memberikan kontribusi penting dalam merekonstruksi sejarah kurikulum Indonesia, namun sebagian besar berhenti pada tataran deskriptif tanpa menggunakan kerangka teori yang memungkinkan analisis kritis terhadap mekanisme kerja kekuasaan di balik kurikulum. Meski sudah ada kajian tentang indoktrinasi Pendidikan Orde Lama (Hutabarat et al., 2023) dan kajian tentang Pendidikan politik sebagai strategi ideologisasi pada masa Demokrasi Terpimpin (Rahmi & Fernandes, 2025), kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan kerangka Apple, Althusser, dan Freire, untuk menganalisis Kurikulum 1964 sebagai fenomena relasi kurikulum kekuasaan masih sangat terbatas. Di sinilah letak kebaruan artikel ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini difokuskan pada tiga tujuan utama. Pertama artikel ini menganalisis cara kekuasaan politik pada era Demokrasi Terpimpin membentuk serta menginstrumentalisasi Kurikulum 1964 sebagai alat kekuasaan negara. Kedua kajian ini menelaah secara kritis kontradiksi antara visi pedagogis Pancawardhana yang progresif dengan realitas praktik indoktrinasi yang bekerja melalui mata

pelajaran sejarah di sekolah. Terakhir artikel ini merumuskan simpulan mengenai relasi struktural antara kurikulum sejarah dan kekuasaan politik di Indonesia melalui refleksi atas keruntuhan Kurikulum 1964. Seluruh analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi studi sejarah kebijakan pendidikan serta pengembangan narasi sejarah dalam kurikulum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis konten kritis. Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian ini adalah pada rekonstruksi dan interpretasi kritis terhadap fenomena historis Kurikulum 1964 berdasarkan sumber-sumber akademik yang tersedia. Dalam kaitan ini, Zed dalam Rahmi & Fernandes (2025) menegaskan bahwa penelitian kepustakaan memiliki legitimasi kuat dalam kajian historis karena memungkinkan sintesis lintas sumber yang menghasilkan wawasan baru.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari karya-karya orisinal para pemikir kurikulum kritis seperti Apple, Althusser, Freire, dan Giroux, serta dokumen akademik mengenai pendidikan era Demokrasi Terpimpin yang meliputi buku dan artikel jurnal ilmiah. Untuk menjamin kemutakhiran data, rujukan artikel jurnal dibatasi pada publikasi nasional terindeks Sinta dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, seleksi literatur untuk memilih sumber yang relevan dengan tema dan berkualitas tinggi. Kedua, pembacaan kritis untuk mengidentifikasi argumen utama serta pola relasi antara kurikulum dan kekuasaan pada Kurikulum 1964. Ketiga, sintesis dan interpretasi untuk

mengintegrasikan temuan-temuan tersebut ke dalam kerangka berpikir Apple, Althusser, Freire, dan Giroux. Terakhir, validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur demi memastikan konsistensi dan keandalan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum 1964 sebagai Produk *Selective Tradition* Rezim Demokrasi Terpimpin

Kurikulum 1964 tidak lahir dari deliberasi pedagogis yang murni dan matang, melainkan muncul sebagai respon atas kebutuhan politis rezim Demokrasi Terpimpin. Kurnia (2021) dalam kajiannya mengenai kebijakan pendidikan masa Orde Lama menegaskan bahwa tatanan sistem pendidikan pada periode ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik negara yang berada di bawah kendali utama tokoh-tokoh nasionalis. Akibatnya, kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosiopolitik yang sedang bergejolak. Perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer menuju Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa konsekuensi signifikan berupa sentralisasi kekuasaan pada Soekarno. Sentralisasi ini kemudian meresap ke seluruh sendi kehidupan bernegara, termasuk ke dalam ranah pendidikan (Hati et al., 2022).

Secara legal formal, kelahiran Kurikulum 1964 dipicu oleh dua instrument hukum yang sangat politis, yaitu TAP MPRS No. I/1960 yang menetapkan Manipol USDEK sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan TAP MPRS No. II/MPRS/1960 yang secara eksplisit mewajibkan setiap pelajar dan mahasiswa mempelajari isi Manifesto Politik sebagai bagian dari kurikulum resmi (Hutabarat et al., 2023). Rahmi & Fernandes (2025)

menjelaskan bahwa dalam bingkai Demokrasi Terpimpin, Pendidikan tidak hanya difungsikan untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen indoktrinasi yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme, anti-imperialisme, dan loyalitas mutlak terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno. Melalui mekanisme hukum inilah, ideologi rezim diintegrasikan secara terstruktur ke dalam sistem Pendidikan nasional.

Jika ditinjau menggunakan kerangka teoritis Apple (2004), mekanisme ini merupakan manifestasi sempurna dari konsep *selective tradition*. Dalam konteks ini pengetahuan yang diseleksi untuk dimasukkan ke dalam Kurikulum 1964 maupun pengetahuan yang dengan sengaja disingkirkan tidak didasarkan pada nilai intrinsik akademisnya melainkan oleh kepentingan rezim yang berkuasa. Zulkarnain (2017) mencatat bahwa para pengambil kebijakan masa Orde Lama lebih banyak mencurahkan perhatian pada aspek konstitusi kenegaraan sehingga kurikulum yang dihasilkan merupakan hasil kompromi antara idealisme pedagogis dan kepentingan politik praktis. Dampaknya muncul sebuah kontradiksi di mana kurikulum secara formal bersifat edukatif namun secara substansif sepenuhnya digerakkan oleh agenda politik atau *politically driven*.

Fenomena instrumentalisasi Pendidikan ini bukanlah anomali yang hanya terjadi di Indonesia. Apple (2000) dalam studinya mengenai *official knowledge* menunjukkan bahwa kontrol negara terhadap pengetahuan resmi dalam kurikulum adalah strategi kekuasaan yang bersifat universal dalam berbagai konteks historis. Namun yang membedakan kasus Indonesia 1964 adalah agresivitas intervensi ideologisnya melalui instrumen hukum formal yang sangat eksplisit. Intervensi ini menjadi sangat menonjol karena negara

secara terang-terangan mengubah fungsi pedagogis sekolah menjadi corong politik resmi melalui legitimasi konstitusional yang bersifat absolut. Amri et al. (2021) menambahkan bahwa perubahan kebijakan yang didasarkan pada kepentingan politik sesaat alih-alih kebutuhan Pendidikan jangka Panjang telah menjadi masalah structural yang berulang dalam Sejarah kurikulum di Indonesia dan kurikulum 1964 merupakan titik paling ekstrem dari pola tersebut.

Pancawardhana di antara Visi Holistik dan Realitas Indoktrinasi

Secara konseptual sistem Pancawardhana yang menjadi inti Kurikulum 1964 memiliki visi yang sesungguhnya progresif untuk zamannya. Berasal dari bahasa Sansekerta *panca* (lima) dan *wardhana* (pengembangan), Pancawardhana mencakup lima dimensi pengembangan manusia yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani (Putri et al., 2025). Setiyorini & Setiawan (2023) menjelaskan bahwa konsep ini mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Pendekatan ini dikenal dengan istilah gotong royong dipimpin sebuah metode belajar yang melampaui paradigma hafalan yang dominan pada masa itu. Pemerintah juga menetapkan Hari Krida pada setiap hari Sabtu, di mana peserta didik diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dan bakat masing-masing (Setiyorini & Setiawan, 2023). Dari sisi pedagogi, gagasan-gagasan ini sebenarnya mengandung benih reformasi yang tetap relevan bahkan hingga hari ini.

Namun, antara visi dan realitas terdapat jurang yang dalam. Putri et al. (2025) mencatat bahwa meskipun Kurikulum 1964

berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, dalam implementasinya kurikulum ini justru dirancang untuk mencetak manusia Indonesia Pancasila yang sosialis. Tujuan tersebut jauh dari visi pengembangan potensi yang bebas dan kritis. Dimensi moral dalam Pancawardhana tidak diartikan sebagai etika individual yang universal, melainkan sebagai moralitas revolusioner yang didefinisikan oleh rezim. Dimensi kecerdasan yang seharusnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam praktiknya justru dipenuhi muatan ideologis terutama pada bidang sejarah dan ilmu sosial (Sulmi & Bahri, 2025).

Kontradiksi ini paling nyata dalam program Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPI). Hutabarat et al. (2023) menjelaskan bahwa melalui TUBAPI mata pelajaran kewarganegaraan secara eksplisit mengkategorikan liberalisme dan individualisme sebagai musuh yang harus dimusnahkan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Manipol USDEK versi Soekarno. Suprayogi et al. (2024) menambahkan bahwa problematika antara internalisasi dan indoktrinasi nilai dalam pendidikan memang memiliki akar historis yang Panjang, di mana Kurikulum 1964 merupakan titik paling ekstrem dari praktik indoktrinasi dalam sejarah pendidikan Indonesia yang merefleksikan konsep *banking education* dari Freire (1970) mengenai kondisi ketika peserta didik tidak didorong untuk berpikir kritis melainkan hanya dijadikan tempat untuk menyimpan deposit ideologi negara. Konsekuensinya, Pancawardhana yang secara teoretis dirancang sebagai basis pengembangan nilai, dalam praktiknya berfungsi sebagai instrumen legitimasi untuk mengukuhkan agenda indoktrinasi politik tersebut..

Pendidikan Sejarah sebagai Aparatus Ideologi Negara

Di antara semua mata pelajaran dalam Kurikulum 1964, Sejarah merupakan instrumen yang paling efektif untuk dijadikan alat kekuasaan. Hal ini menunjukkan dengan jelas bekerjanya *Ideological State Apparatus* atau Aparatus Ideologi Negara sebagaimana dijelaskan dalam teori Althusser (1971). Dalam perspektif ini negara tidak hanya menggunakan kekuatan fisik untuk memerintah melainkan juga menggunakan lembaga institusional seperti sekolah untuk menanamkan ideologi secara halus agar masyarakat menjadi patuh secara sukarela. Sejalan dengan kerangka teoritis tersebut, Sulmi & Bahri (2025) secara tegas menyatakan bahwa Kurikulum 1964 menjadikan pendidikan sejarah sebagai alat ideologis negara. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang memiliki kesetiaan penuh terhadap Manipol USDEK serta ideologi Nasakom melalui narasi sejarah yang disesuaikan. Zulkarnain (2017) menambahkan bahwa pengembangan kurikulum sejarah pada masa Orde Lama sangat diwarnai oleh kepentingan politik penguasa. Akibatnya, tujuan pendidikan sejarah bergeser dari pembentukan kesadaran historis yang kritis menuju pembentukan kesadaran ideologis yang patuh.

Narasi anti NEKOLIM (Neo Kolonialisme, Kolonialisme, dan Imperialisme) menjadi benang merah yang mengikat seluruh materi sejarah pada masa itu. Pertama, sejarah perjuangan kemerdekaan dinarasikan sebagai revolusi yang belum selesai. Kemerdekaan formal 1945 harus dilanjutkan dengan perjuangan kemerdekaan ekonomi dan kedaulatan budaya dari pengaruh asing. Cara pandang ini secara langsung melegitimasi agenda politik Soekarno. Kedua, peristiwa seperti

Konferensi Asia Afrika 1955 diposisikan sebagai momen historis di mana Indonesia memimpin perjuangan bangsa-bangsa terjajah. Hal ini bertujuan membangun kebanggaan nasional sekaligus memperkuat posisi Soekarno sebagai pemimpin dunia ketiga (Sulmi & Bahri, 2025). Ketiga, kebijakan konfrontasi dengan Malaysia dan penolakan terhadap PBB dijelaskan dalam kerangka anti imperialisme. Melalui Pendidikan sejarah keputusan politik tersebut diubah menjadi narasi heroik yang wajib diajarkan dan dipuja di sekolah-sekolah.

Proses dekolonisasi buku teks yang terjadi pada periode ini memiliki dimensi ganda yang perlu dibaca secara kritis. Di satu sisi, penggantian buku-buku berbahasa Belanda yang berperspektif Eropasentris dengan sumber berbahasa Indonesia merupakan langkah dekolonisasi yang secara prinsip sah dan diperlukan (Fadli & Kumalasari, 2019; Nebras & Bahri, 2025). Namun di sisi lain, perspektif yang menggantikannya bukan pemikiran yang kritis, plural, dan membebaskan, melainkan perspektif nasiosentris Soekarno yang memiliki bias ideologisnya sendiri. Dengan demikian, yang terjadi sebenarnya adalah pergantian dari satu bentuk hegemoni ke hegemoni lainnya. Hal ini merefleksikan pandangan Apple (2004) mengenai pembentukan pengetahuan resmi atau *official knowledge*. Meskipun narasi baru tersebut tampak lebih nasionalis dan mandiri, pada hakikatnya kurikulum tersebut tetap tidak netral karena disusun untuk melayani kepentingan ideologi kelompok yang sedang memegang kendali kekuasaan.

Rahmi & Fernandes (2025) menegaskan bahwa pendekatan indoktrinatif dalam pendidikan politik masa Demokrasi Terpimpin memiliki peran strategis dalam membangun identitas

nasional dan integrasi politik. Namun di sisi lain juga bermasalah karena menekan pluralitas, membatasi kebebasan berpikir, dan mempersempit ruang diskursus politik. Inilah paradoks fundamental dari pendidikan sejarah dalam Kurikulum 1964. Semakin kurikulum tersebut berhasil menanamkan narasi tunggal yang menguntungkan rezim, maka semakin kurikulum tersebut gagal menjalankan fungsi sesungguhnya sebagai pendidikan Sejarah. Fungsi utama Pendidikan Sejarah seharusnya adalah membangun kemampuan berpikir historis, kritis, dan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang yang berbeda (Zulkarnain, 2017).

Kegagalan proyek indoktrinasi ini terbukti paling nyata di level perguruan tinggi. Hutari (2022) dalam kajiannya mencatat bahwa indoktrinasi Manipol USDEK di Universitas Indonesia 1961-1967 gagal ditanamkan karena dianggap mengekang kebebasan akademik. Komunitas akademik secara aktif melakukan penolakan terhadap program tersebut karena merasa kedaulatan intelektual mereka terancam. Temuan ini sejalan dengan pandangan teoritis Giroux (1983) bahwa kurikulum tidak pernah bekerja tanpa adanya resistensi. Semakin keras negara memaksakan ideologi melalui Pendidikan maka semakin kuat pula penolakan yang muncul dari komunitas yang memiliki kapasitas kritis. Paradoksnya justru pemaksaan ideologi yang masif itulah yang memicu pada akhirnya perlawanan dan melemahkan legitimasi kurikulum itu sendiri dari dalam.

Keruntuhan Kurikulum sebagai Cermin Kerapuhan Politik dalam Perspektif Komparatif

Nasib Kurikulum 1964 membuktikan gagasan utama artikel ini secara paling gamblang. Pasca peristiwa G30S/PKI 1965

dan berakhirnya kekuasaan Soekarno, Kurikulum 1964 tidak dievaluasi secara pedagogis untuk diperbaiki atau disempurnakan, melainkan dihapuskan secara politis sebagai bagian dari delegitimasi Orde Lama secara menyeluruh. Respatiadi et al. (2022) secara eksplisit mencatat bahwa kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu untuk mengubah citra Kurikulum 1964 yang dianggap sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini runtuh bukan karena terbukti gagal secara pedagogis, melainkan karena basis politik pendukungnya telah runtuh. Fenomena ini menjadi Pelajaran paling nyata mengenai konsekuensi dari sebuah kurikulum yang terlalu menumpangkan identitas pada satu rezim tertentu.

Untuk mempertegas argumen ini, berikut perbandingan struktural antara Kurikulum 1964 dan penggantinya, Kurikulum 1968:

Tabel 1
Perbandingan struktural antara Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968

Aspek	Kurikulum 1964	Kurikulum 1968
Landasan Ideologi	Manipol USDEK / Nasakom	Pancasila versi Orde Baru / anti PKI
Kerangka Kurikulum	Separate Subject, Pancawardhana	Correlated Subject, 9 Mapel
Fungsi Sejarah	Legitimasi revolusi & anti NEKOLIM	Legitimasi Orde Baru & de Sukarnoisme
Musuh Ideologis	NEKOLIM, liberalisme,	Komunisme / PKI, Orde Lama

	imperialism e	
Penyebab Berakhir	Pergantian rezim (G30S/PKI 1965)	Reorganisasi menjadi Kurikulum 1975

Sumber. *Diadaptasi dari Nebras & Bahri (2025); Respatiadi et al. (2022); Sulmi & Bahri (2025)*

Tabel di atas mengungkapkan pola yang sama yang menjadi temuan utama artikel ini. Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968, meskipun secara ideologi berlawanan, ternyata berbagi karakteristik dasar yang identik. Kedua kurikulum tersebut sama-sama menempatkan kepentingan rezim di atas kepentingan pedagogis. Keduanya juga menggunakan pendidikan sejarah sebagai alat indoktrinasi ideologi tertentu dan keduanya sangat rentan terhadap perubahan politik. Hal ini terjadi karena identitas kurikulum kurikulum tersebut dibangun di atas fondasi kekuasaan rezim dan bukan di atas fondasi pedagogis yang otonom. Nebras & Bahri (2025) membuktikan bahwa pola ini berlanjut jauh ke dalam Orde Baru di mana kurikulum mengalami pergantian sebanyak empat kali yaitu 1968, 1975, 1984, dan terakhir 1994. Di setiap pergantian tersebut, mata pelajaran sejarah selalu menjadi instrumen pembentukan nasionalisme versi rezim yang berkuasa. Fenomena ini menunjukkan adanya pergantian identitas luar tanpa mengubah logika kekuasaan yang mendasarinya.

Amri et al. (2021) mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan yang selalu berubah mengikuti kepentingan politik memberikan dampak buruk terhadap proses pendidikan itu sendiri. Ketidakkonsistenan kebijakan tersebut menghambat pengembangan sistem pendidikan yang stabil dan berkualitas bagi peserta didik. Dalam kerangka pemikiran Apple (2000), pola berulang ini adalah

cerminan dari perebutan *official knowledge* atau pengetahuan resmi yang bersifat struktural. Siapa pun yang sedang berkuasa akan berusaha mengendalikan definisi pengetahuan yang dianggap sah dalam kurikulum. Dengan demikian pergantian rezim hanya mengubah pihak yang memenangkan perebutan tersebut tanpa menghilangkan logika persaingan kekuasaan itu sendiri di dalam dunia pendidikan.

Relevansi bagi Kebijakan Kurikulum Kontemporer

Analisis historis terhadap Kurikulum 1964 menghasilkan setidaknya tiga pelajaran kritis yang melampaui kajian sejarah semata dan relevan bagi kebijakan kurikulum Indonesia kontemporer. Pertama, kurikulum yang terlalu berpihak pada ideologi rezim tertentu akan selalu rentan mengalami nasib yang sama dengan rezim itu pendukungnya. Otonomi pedagogis kurikulum yakni kapasitas kurikulum untuk berfungsi sebagai instrumen pendidikan yang bebas dari fluktuasi kepentingan politik jangka pendek merupakan prasyarat mutlak bagi stabilitas dan kualitas pendidikan jangka panjang. Amri et al. (2021) menegaskan bahwa konsistensi kebijakan pendidikan yang didasarkan pada kebutuhan pedagogis dan bukan kepentingan politik adalah syarat untuk membangun sistem pendidikan yang bermutu.

Kedua, potensi pedagogis yang tulus sering kali terkubur di bawah beban ideologisasi yang berlebihan. Sistem Pancawardhana, dengan visinya tentang pengembangan manusia secara holistik, pengembangan kemampuan pemecahan masalah, dan apresiasi terhadap bakat individual melalui Hari Krida, sesungguhnya mengandung gagasan-gagasan yang jauh lebih relevan dari sekadar

retorika zamannya (Setiyorini & Setiawan, 2023). Gagasan-gagasan ini kembali dipopulerkan dalam berbagai reformasi kurikulum kontemporer termasuk Kurikulum Merdeka, namun dalam konteks Kurikulum 1964 benih-benih ini tidak sempat tumbuh karena lahan kurikulumnya terlalu penuh dengan muatan ideologi. Fenomena Ini menjadi Pelajaran berharga tentang kerugian besar ketika kurikulum disandera oleh kepentingan politik karena potensi inovasi akan mati sebelum sempat diuji secara luas.

Ketiga, indoktrinasi masif dalam pendidikan terbukti bukan hanya tidak efektif, melainkan justru berdampak buruk bagi kewibawaan kurikulum itu sendiri. Kegagalan indoktrinasi TUBAPI di Universitas Indonesia sebagaimana dicatat oleh Hutari (2022) menunjukkan bahwa komunitas akademik memiliki kapasitas kritis untuk menolak pemaksaan ideologi. Penolakan tersebut pada akhirnya justru melemahkan wibawa kurikulum di mata masyarakat intelektual. Suprayogi et al. (2024) mengingatkan bahwa problematika antara internalisasi dan indoktrinasi nilai merupakan persoalan yang tidak pernah selesai dalam sejarah pendidikan Indonesia. Oleh karena itu kebijakan kurikulum di masa depan harus lebih mengutamakan pengembangan nalar kritis daripada sekadar penanaman doktrin tunggal agar kurikulum tersebut memiliki daya tahan dan legitimasi yang kuat di tengah masyarakat.

Ketiga pelajaran di atas bermuara pada satu kesimpulan teoretis yang ditawarkan Giroux (1983), bahwa ruang pendidikan tidak pernah sepenuhnya dikuasai oleh negara karena di dalamnya selalu ada potensi resistensi yang bersifat transformatif. Kegagalan indoktrinasi di Universitas Indonesia bukan sekadar insiden historis, melainkan bukti bahwa komunitas kritis selalu mampu menciptakan ruang

perlawanan terhadap kurikulum yang represif. Implikasinya bagi kebijakan kurikulum kontemporer sangat jelas, yaitu alih-alih menjadikan kurikulum sebagai instrumen konsolidasi ideologi, negara justru perlu memperkuat kapasitas peserta didik untuk berpikir kritis, mempertanyakan narasi tunggal, dan membangun kesadaran historis yang multiperspektif. Hanya dengan cara itulah kurikulum dapat memiliki legitimasi yang organik, bukan legitimasi yang dipaksakan dan karena itu selalu rapuh.

SIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini telah menunjukkan bahwa Kurikulum 1964 merupakan kajian kritis yang krusial mengenai cara otoritas politik membentuk serta menginstrumentalisasi kurikulum pendidikan yang pada akhirnya menyebabkan keruntuhan kurikulum tersebut. Dengan mengintegrasikan kerangka teoretis Michael Apple, Louis Althusser, Paulo Freire, dan Henry Giroux, analisis ini berhasil melampaui sekadar deskripsi historis. Kajian ini mampu menyingkap mekanisme struktural mengenai cara kekuasaan bekerja di balik desain kurikulum, sekaligus memetakan ruang resistensi intelektual yang muncul sebagai reaksi atas pemaksaan ideologi tersebut. Melalui instrumen hukum TAP MPRS dan mandat program TUBAPI, rezim Demokrasi Terpimpin secara sistematis mengubah kurikulum dari instrumen pedagogis menjadi sebuah teknologi politik. Dampak dari instrumentalisasi tersebut adalah tereduksinya sistem Pancawardhana yang secara visi bersifat holistik dan progresif akibat politisasi masif. Pendidikan sejarah pun tidak lagi difungsikan untuk mengembangkan kemampuan berpikir historis yang kritis, melainkan dikonversi menjadi aparatus ideologi negara yang melayani legitimasi rezim secara absolut. Namun, penyeragaman ini terbentur oleh resistensi komunitas akademik yang menolak

pengekangan kebebasan berpikir. Akibatnya, ketika rezim Soekarno runtuh, Kurikulum 1964 pun mengalami nasib yang sama. Kurikulum tersebut hancur bukan semata karena kegagalan nilai pedagogisnya, melainkan karena kerapuhan fondasi politis yang sangat bergantung pada kekuasaan sementara serta kegagalan internal proyek indoktrinasinya. Melalui analisis komparatif dengan Kurikulum 1968, artikel ini menyimpulkan bahwa pola instrumentalisasi kurikulum bersifat struktural dan berulang lintas rezim. Inilah kontribusi teoretis utama dari kajian ini, yaitu membuktikan bahwa relasi yang timpang antara kurikulum dan kekuasaan di Indonesia bukanlah sebuah anomali historis pada masa Orde Lama semata, melainkan persoalan struktural yang persisten. Oleh karena itu, diskusi reformasi kurikulum di masa depan memerlukan solusi institusional yang fundamental berupa jaminan otonomi pedagogis guna memagari sistem pendidikan dari intervensi ideologis sesaat. Pekerjaan rumah intelektual ini tetap menjadi urgensi yang relevan dalam menavigasi arah pendidikan Indonesia hingga hari ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Althusser, L. (1971). Ideology and Ideological State Apparatuses. In *New Critical Writings in Political Sociology* (pp. 299–340). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003572923-18>
- Amri, U., Rifma, R., & Syahril, S. (2021). Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2200–2205. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.778>
- Ananda, A. P., & Hudaidah. (2021). PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN INDONESIA DARI MASA KE MASA. *Sindang Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3(2), 102–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.31540/sindang.v3i2.1192>
- Apple, M. W. (2000). *Official knowledge: Democratic education in a conservative age* (2nd ed) (2nd ed.). Routledge.
- Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum* (Third Edit). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203487563>
- Arka, I. M., & Agung, N. W. (2021). Manipol usdek sebagai tantangan pendidikan pada jaman reformasi bagi generasi penerus bangsa. *Jurnal Cakrawati*, 4(1), 51–59.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 9(2), 157–171. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4168>
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. In *Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy*. Continuum Books.
- Giroux, H. A. (1983). *Theory and resistance in education: A pedagogy for the opposition*. (6th ed.). Bervin & Garvey.
- Hati, L. P., Dara, L., & Utami, C. (2022). *Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965 : Soekarno , TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia*. 6(2), 161–180.
- Hutabarat, Y. V., Medan, U. N., Sijabat, D. P., Medan, U. N., Andini, R. K., & Medan, U. N. (2023). *INDOKTRINASI PENDIDIKAN PADA MASA ORDE LAMA : MENANAMKAN NILAI PANCASILA DAN MANIPOL / USDEK*. 1(6), 23–32.
- Hutari, F. (2022). *Gagalnya indoktrinasi Manipol-USDEK di perguruan tinggi*. Alinea.Id.

- <https://www.alinea.id/politik/gagalnya-indoktrinasi-manipol-usdek-di-perguruan-tinggi-b2foE9F6Y>
- Kurnia, H. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(3), 839–846. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.448>
- Nebras, A., & Bahri. (2025). Kurikulum pendidikan sejarah pada masa orde baru. *Jurnal Media Akademika*, 3(4), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/wye0v218>
- Putri, D. S., Marzelni, Delastri, Y., Anggraini, D., Demina, & Darmansyah. (2025). Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.D), 111–122. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9693>
- Rahmi, A., & Fernandes, R. (2025). Pendidikan Politik Sebagai Strategi Ideologisasi pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966). *Jurnal Kajian Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 271–282. <https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.31>
- Respatiadi, F., Zid, M., & Hotimah, O. (2022). KOMPARASI KURIKULUM 1964 DAN 1968 SERTA KAJIAN MATERI GEOGRAFI PADA JENJANG SMP. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Teknologi*, 9(1), 278–290.
- Setiyorini, S. R., & Setiawan, D. (2023). Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1), 1–12.
- Sulmi, & Bahri. (2025). Kurikulum Sejarah di Indonesia Tahun 1947-1965. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(7), 1575–1585.
- Suprayogi, Rahmawati, E., Rafi, H., & Harto, G. (2024). Problematika antara Internalisasi dan Indoktrinasi Nilai Pancasila. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 98–106. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/10347/4409>
- Wibowo, B. A. (2021). Kajian Kebijakan Kurikulum Indonesia 1947-2013. *Jurnal of Education*, 03(04), 420–432.
- Zulkarnain. (2017). FILOSOFIS KURIKULUM MATA PELAJARAN SEJARAH MASA ORDE LAMA Zulkarnain. *HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 1(1), 57–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/historia.v1i1.7011> FILOSOFIS